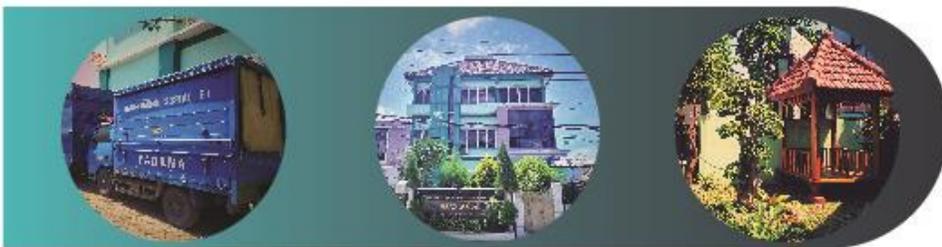




2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS SOSIAL

 Jl. Pahlawan No. 45, Sidoarjo

 [dinsos.sidoarjo](https://www.instagram.com/dinsos.sidoarjo)

 dinsos.sidoarjokab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good and Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sidoarjo, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO**



Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196804111989081001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kedudukan	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Tujuan dan Sasaran	5
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	6
2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2022	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Pengukuran Kinerja	10
3.2 Analisis Capaian Kinerja	14
3.3 Realisasi Anggaran	25
3.4 Efisiensi Tahun 2022	29
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Rencana Tindaklanjut	32
BERITA ACARA REVIU LKJIP Tahun 2022	33
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	2
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah	3
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Sosial	5
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	6
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Tambahan	7
Tabel 2.4	Rincian Anggaran Pada Tahun 2022	9
Tabel 3.1	Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja	11
Tabel 3.2	Hasil Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja	11
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Tujuan	14
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	15
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Nasional	18
Tabel 3.6	Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022	19
Tabel 3.7	Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Terhadap Target Akhir Renstra ...	20
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan	21
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Dan Keuangan	26
Tabel 3.10	Tingkat Efisiensi Anggaran	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.....	15
Grafik 3.2 Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022	17
Grafik 3.3 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya PPKS yang Terlayani Tahun 2021-2022	19
Grafik 3.4 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama	20
Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Renstra	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	2
--	---

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKJIP tahun 2022 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi diukur melalui capaian indikator kinerja. Capaian indikator kinerja tahun 2022 yang menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 adalah Sasaran Strategis yaitu a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan b. Meningkatnya kualitas pelayanan PPKS, dengan Indikator Kinerja Sasaran berupa Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (tercapai 100,68%) dan Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan (tercapai 102,26%) dengan kategori Sangat Baik, yang menandakan bahwa kinerja tercapai.

Pada tahun 2022 Dinas Sosial mengampu 2 Program Prioritas Bupati Terpilih yaitu Makan Gratis Warga Miskin dan Beasiswa untuk warga miskin. Untuk Program Makan Gratis Warga Miskin telah dilaksanakan mulai 1 September 2022 dengan sasarannya adalah Lansia yang ber KTP di Sidoarjo dimana ada 730 penerima diberikan makanan sehari 2 kali senilai Rp. 15.000,- Untuk Beasiswa warga miskin Dinas Sosial mendapatkan kuota sebanyak 500 penerima dengan nilai masing-masing penerima Rp. 2.500.000,-

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS tercapai sebesar 102,97% dengan kategori sangat baik dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 91,34%. Secara umum Dinas Sosial telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Dari segi anggaran terdapat efisiensi sebesar 8,66% atau Rp 3.006.588.270,- Hal ini menunjukkan dampak signifikan dari aktivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Keberhasilan ketercapaian ini tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik diinternal Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sendiri, serta terjalinnya hubungan baik dengan stakeholder/mitra

sosial yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. Kolaborasi penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dan program prioritas Bupati yaitu makanan gratis warga miskin dan beasiswa untuk mendukung ketercapaian kinerja Dinas Sosial.

Kemampuan SDM yang dimiliki juga menjadi faktor pendukung keberhasilan baik petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, mitra sosial ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan tersebut. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kedudukan

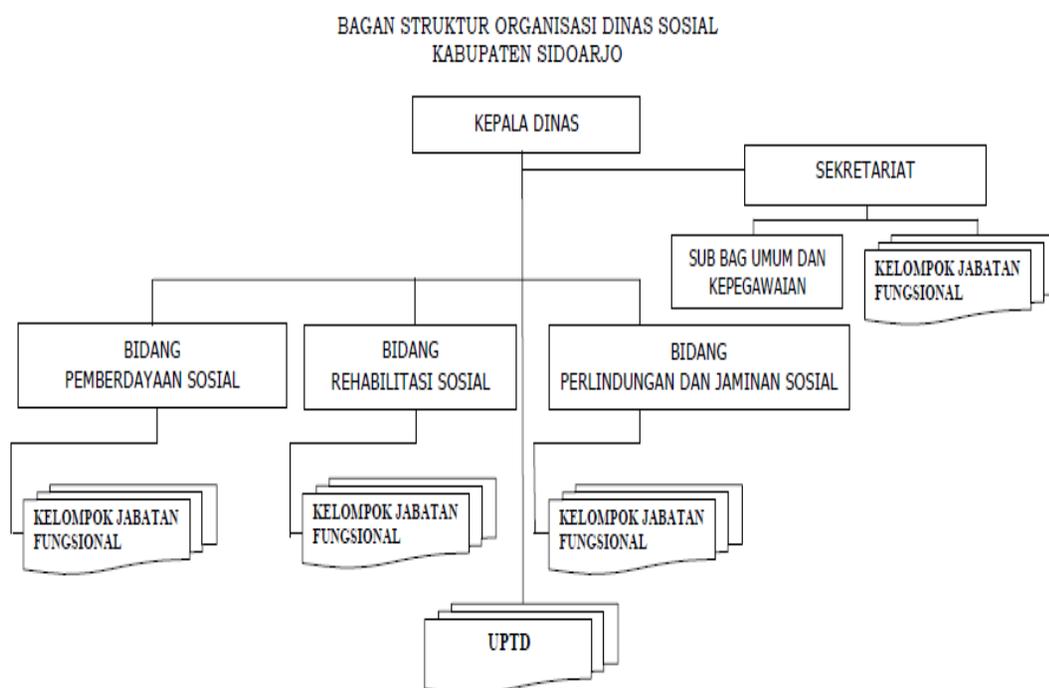
Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang sosial.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 28 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Administrator	3
3	Pengawas	1
4	Pelaksana	14
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda	7
6	Jabatan Fungsional Mahir	1
	Total	27

Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Umum

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah PPKS yang terus mengalami peningkatan	Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS	Kurangnya Tenaga SDM Dalam Pelayanan PPKS
		Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PPKS	Belum ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan <i>stakeholder</i> sebagai Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal penanganan PPKS.
2	Masih banyaknya fakir miskin yang belum mendapatkan program perlindungan dan jaminan social	Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan	Tata kelola program perlindungan dan jaminan social masih lemah
3	Masih terdapat kesalahan data pada DTKS Kabupaten Sidoarjo	lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis <i>by name by</i>	Komunikasi dan koordinasi lintas sector (PD) yang belum berjalan lancar dan massif.

		<i>address</i> lintas Perangkat Daerah (PD).	
4	Program penanganan kemiskinan (PPKS) masih berjalan parsial	Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain	Sinergi antar perangkat daerah dalam hal penanganan kemiskinan (PPKS) masih lemah
5	Belum optimalnya penanganan dampak sosial bencana	Kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih lemah	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM masih terbatas.

Sumber data : Renstra 2021-2026

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan;
- b. Lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis *by name by address* lintas Perangkat Daerah (PD);
- c. Kurang optimalnya pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS;
- d. Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PPKS;
- e. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;
- f. Kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih perlu ditingkatkan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi 2 yaitu **“Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan”**.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan 2 yang akan kami dukung adalah Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran 4 yaitu menurunnya penduduk miskin yang dituju. Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan yaitu Peningkatan Kesejahteraan sosial dan sasarannya yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS. Perencanaan strategis Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Sosial

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD
M.2 Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada	T.2 Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada	S.4 Menurunnya Penduduk Miskin	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS

Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan			
---	---------------------------	--	--	--

Sumber data : Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	94%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan	80%

Sumber data : PK Perubahan Kepala Dinas Sosial tahun 2022

Pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra, indikator Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan, dengan target 94% dengan pertimbangan capaian tahun lalu 94,07% dan target di Renstra tahun 2022 94%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 94%.

Adanya perbedaan definisi operasional pada indikator kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2022 menjadikan tidak dapat diperbandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 definisi konsep PMKS/PPKS adalah keseluruhan PPKS yang terdata yaitu 48.718 Jiwa, sedangkan pada tahun 2022 definisi konsepnya PPKS adalah keseluruhan penduduk miskin yang tercatat dalam DTKS ditambah penduduk miskin yang belum terdaftar dalam DTKS sehingga terjadi pelonjakan data PPKS yang

mendapatkan pelayanan di tahun 2022. Jadi untuk tahun 2022 menjadi kondisi awal target di Renstra tahun 2022 untuk indikator Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 80%.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tambahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET
1	Tersalurnya Beasiswa Untuk Mahasiswa dari Keluarga Miskin	Jumlah Mahasiswa Keluarga Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	500 Orang
2	Tersalurkannya Bantuan Program Gratis Makanan Setiap Hari Bagi Warga Miskin	Jumlah orang penerima bantuan program gratis makanan setiap hari warga miskin	730 Orang/kali @ 2 kali
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Nilai RB Nilai IPP Nilai SKM Persentase Penyerapan Anggaran	BB 27% A Sangat Baik 85%

Sumber data : PK Perubahan Kepala Dinas Sosial tahun 2022

Pada indikator kinerja tambahan merupakan penguatan pencapaian pada program strategis daerah, serta tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepada Kepala Dinas Sosial untuk dilaksanakan dan dicapai dan dilaporkan pada akhir tahun yang dikordinasikan oleh Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi guna disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun

2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 38.010.865.096,- Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 34.510.768.477,- dengan rincian sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rincian Anggaran Pada Tahun 2022

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,460,000.00	11,460,000.00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,567,097,417.00	5,120,744,077.00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	650,213,487.00	602,692,268.00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,689,235.00	68,583,575.00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,128,840,800.00	1,199,770,800.00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	684,059,985.00	639,159,985.00
2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,863,359,695.00	2,534,086,740.00
3			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	8,168,577,923.00	7,473,289,362.00

Tabel 3.2
Hasil Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	% Capaian	Kategori
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	Sangat Baik
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	100%	Sangat Baik
		Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	101.49%	Sangat Baik
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	108.18%	Sangat Baik
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	98.21%	<i>Sangat Baik</i>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	83.25%	Baik
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	99.11%	<i>Sangat Baik</i>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	49.93%	Kurang
		Jumlah kunjungan tamu yang diasilitasi	49.93%	Kurang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan	100%	Sangat Baik
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	98.27%	<i>Sangat Baik</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	100%	<i>Sangat Baik</i>
		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	100%	<i>Sangat Baik</i>
		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	100%	<i>Sangat Baik</i>
	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	100%	<i>Sangat Baik</i>	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	129.47%	Sangat Baik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	85.00%	Baik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	94.44%	Sangat Baik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	100%	Sangat Baik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	168%	Sangat Baik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	100%	Sangat Baik
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Sangat Baik
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina	100%	Sangat Baik
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina	100%	Sangat Baik
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	100%	Sangat Baik
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	Sangat Baik
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang dibina	100%	Sangat Baik
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS prioritas yang terlayani	100%	Sangat Baik
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani	100%	Sangat Baik
		Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani	100%	Sangat Baik
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani	100%	Sangat Baik
		Jumlah PPKS Klien Liponsos yang Terlayani	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan sandang	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu	100%	Sangat Baik

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	100%	Sangat Baik
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar mendapat bimbingan sosial	100%	Sangat Baik
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan PMKS	100%	Sangat Baik
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	100%	Sangat Baik
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan	100%	Sangat Baik
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	100%	Sangat Baik
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100.43%	Sangat Baik
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	97.42%	Sangat Baik
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melakukan Verifikasi dan Validasi	99.15%	Sangat Baik
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data PKH yang Dilaksanakan	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KPM Bantuan Sosial Lainnya yang Memenuhi Persyaratan	100%	Sangat Baik
		Persentase KPM BPNT yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM BPNT	100%	Sangat Baik
		Persentase KPM PKH yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM PKH	100%	Sangat Baik
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Pangan	100%	Sangat Baik
		Jumlah Penerima Bantuan Program Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin	100%	Sangat Baik
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE yang Dimonev	0.00%	Kurang
		Jumlah KUBE yang Memperoleh Akses Permodalan	83%	Baik
		Jumlah KUBE yang Terbentuk	100%	Sangat Baik
		Jumlah Warga Miskin yang Dilatih		
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	Sangat Baik
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan permakanan	92.80%	Sangat Baik
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang Dibina	100%	Sangat Baik
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang menerima penguatan SDM	100%	Sangat Baik

6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	100%	Sangat Baik
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi yang Baik	100%	Sangat Baik
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	Sangat Baik
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Keamanan Taman Makam Pahlawan yang terbayar	100%	Sangat Baik

Sumber data : Laporan Monev Tribulan IV tahun 2022

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 :

1. Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada Tahun 2022 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Tujuan

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	%
1	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	94,00	94,64	100,68

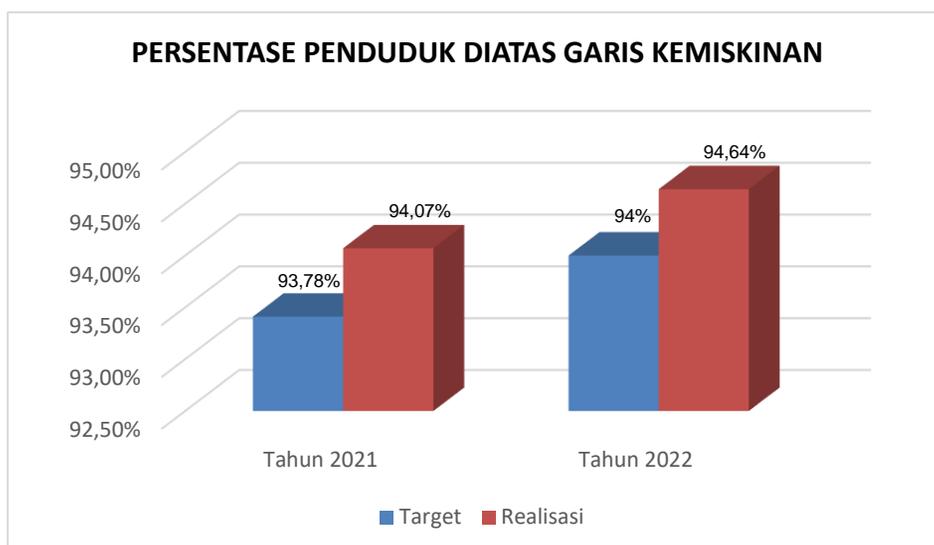
Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Yang dimaksud dengan "Kemiskinan" adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin berdasarkan releas BPS Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 5,71% dan tahun 2022 sebesar 6%, dengan demikian dapat disimpulkan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebanyak 1.989.167 jiwa atau sekitar 94,64% dari

jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021: 93,78% maka penduduk yang berada diatas garis kemiskinan tercapai 94,64%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 94,07% maka terdapat peningkatan angka 11.980 jiwa atau sekitar 0,57%. Perkembangan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.1 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan



Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya yang dilaksanakan sesuai sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS, dimana dengan pelayanan yang meningkat maka kemiskinan akan turun yang berdampak pada penduduk diatas garis kemiskinan naik.

2. Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS

Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 102,97%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS

Tabel 3.4
Realisasi kinerja sasaran pertama
meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	80%	82.38%	102.97%

Grafik 3.2
Realisasi Kinerja Sasaran Pertama
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran diukur tingkat keberhasilannya dengan 1 (satu) indikator. Indikator Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan adalah jumlah PPKS (DTKS dan Non DTKS) yang menerima layanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dapat direalisasi sebesar 82,38% dari target tahun ini ditetapkan sebesar 80%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. *Launching* program Beasiswa untuk warga miskin serta makan gratis untuk lanjut usia;
2. Pemberian bantuan sosial penyandang disabilitas berat, permakanan anak panti asuhan;
3. Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBN/APBD, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Minyak Goreng, BLT BBM
4. Bantuan sembako bagi warga miskin gan pengemudi bentor sebagai dampak inflasi BBM

1. Belum seluruhnya warga masyarakat miskin dan PPKS lainnya tercover dalam program perlindungan jaminan sosial khususnya program jaminan Kesehatan nasional (JKN);
2. Updating Data PPKS dan data kemiskinan yang kurang maksimal;
3. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang belum optimal;
4. Pemberdayaan fakir miskin dan PPKS lainnya yang belum optimal;
5. Kondisi sarana dan prasarana serta Gedung UPT PP Rehsos yang belum sesuai standar;
6. Kapasitas SDM bidang sosial yang belum optimal;
7. Pada tahun 2022 Pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga berdampak terhadap perekonomian, dan banyak pekerja yang di PHK oleh perusahaan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Nasional maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang kurang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Nasional.

Tabel 3.5
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Provinsi/ Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	82,38%	100% (Sandart Pelayanan Minimal)

Sumber : olah data

Indikator Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 adalah Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dengan target 80% dari jumlah PPKS pada tahun 2022 sebanyak 472.340 jiwa. Realisasi PPKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2022 sebanyak 486.406 jiwa (82,38%). Dari target 80% jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan tercapai 82,38%. Dengan demikian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 tercapai 102,97%.

Indikator Dinas Sosial 2021 adalah persentase jumlah PMKS yang terlayani. Target PMKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2021 sebanyak 48.718

dan realisasi PPKS sebanyak 48.718. dengan demikian pada tahun 2021 kinerja Dinas Sosial tercapai 100%.

Adanya perbedaan definisi operasional pada indikator kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2022 menjadikan tidak dapat diperbandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 definisi konsep PMKS/PPKS adalah keseluruhan PPKS yang terdata yaitu 48.718 Jiwa, sedangkan pada tahun 2022 definisi konsepnya PPKS adalah keseluruhan penduduk miskin yang tercatat dalam DTKS ditambah penduduk miskin yang belum terdaftar dalam DTKS sehingga terjadi pelonjakan data PPKS yang mendapatkan pelayanan di tahun 2022 sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut :

Grafik 3.3 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya PPKS yang Terlayani Tahun 2021-2022

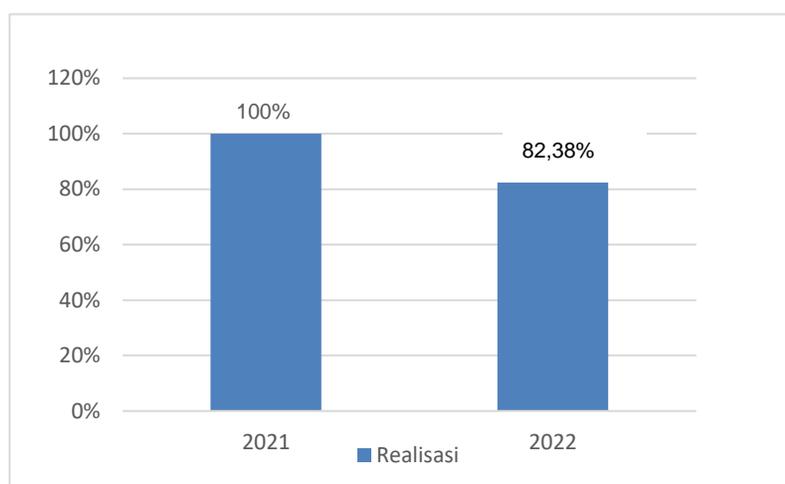


Tabel 3.6
Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS terhadap Penduduk	100%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan		82,38%

Sumber : olah data

Grafik 3.4 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama



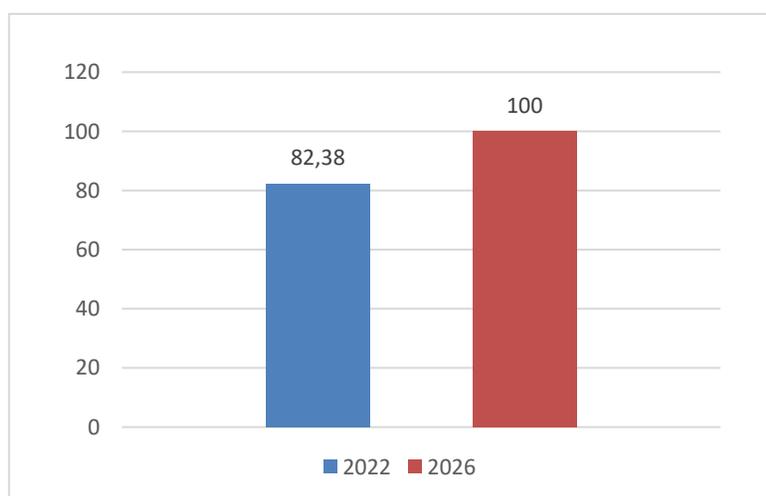
Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026 yaitu 82,38% dari target akhir sebesar 100%. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

**Tabel 3.7
Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Terhadap
Target Akhir Renstra**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS Yang mendapatkan Pelayanan	100%	82,38%	82,38%

Sumber : olah data

**Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Renstra**



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan PPKS adalah sebesar Rp. 34.710.768.477,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.704.180.2017,-. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan PPKS. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan PPKS.

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	KINERJA		ANGGARAN	
				Target	Realisasi	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	90	90	7,642,410,705.00	6,979,940,339.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	4	11,460,000.00	5,840,100.00
		Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan	Tahap	2	2		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4	2,000,000.00	1,219,900.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	3,210,000.00	747,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	3,400,000.00	2,801,200.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	Dokumen	4	4	2,850,000.00	1,072,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	90	91.34	5,120,744,077.00	4,712,713,428.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	5,118,394,077.00	4,712,008,228.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	Laporan	1	1	2,350,000.00	705,200.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	90	97.36	602,692,268.00	521,929,451.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	Buah	119	119	6,750,596.00	6,725,950.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Buah	894	878	46,650,057.00	45,030,150.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	Liter	21300	17732	213,000,000.00	177,344,819.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Lembar	3380	3350	4,399,250.00	4,365,500.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jenis	3	3	5,961,600.00	4,915,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	Kotak	685	342	14,862,500.00	6,823,100.00
		Jumlah kunjungan tamu yang diasilitasi	Orang	685	342		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	%	100	100	311,068,265.00	276,724,932.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan	Unit	13	13	68,583,575.00	65,768,800.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	Unit	13	13	68,583,575.00	65,768,800.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	%	100	100	1,199,770,800.00	1,089,998,853.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Surat	13000	12775	500,000.00	500,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	12	302,000,000.00	254,316,505.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Orang	228	228	897,270,800.00	835,182,348.00
		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang	48	48		
		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang	48	48		
		Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang	336	336		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	95	123	639,159,985.00	583,689,707.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	40	34	132,500,000.00	131,824,900.00
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	STNK	18	17		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	2	2	230,000,000.00	226,142,717.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	50	84	196,029,985.00	166,618,750.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	3	3	80,630,000.00	59,103,340.00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	60	60	2,534,086,740.00	2,496,348,625.00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina	PSKS	6	6	2,534,086,740.00	2,496,348,625.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina	PSM	100	100	72,000,000.00	66,000,000.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	TKSK	18	18	432,000,000.00	432,000,000.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang dibina	PSKS Kelembagaan	5	5	2,022,786,050.00	1,991,048,925.00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang dibina	LK3	1	1	7,300,690.00	7,299,700.00
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS prioritas yang terlayani	%	59.51	59.51	7,614,514,362.00	7,520,040,356.00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani	Orang	1311	1311	7,473,289,362.00	7,379,051,356.00

		Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani	Orang	10	10		
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani	Orang	120	120		
		Jumlah PPKS Klien Liposos yang Terlayani	Orang	900	900		
	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan	Orang	2311	2311	5,817,347,244.00	5,792,981,519.00
	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan sandang	Orang	900	900	45,101,800.00	34,308,000.00
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu	Orang	30	30	144,650,000.00	133,526,800.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	920	920	386,650,000.00	382,332,600.00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar mendapat bimbingan sosial	Keluarga	100	100	17,275,000.00	16,975,000.00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan PMKS	Bulan	12	12	215,034,084.00	184,948,576.00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Bulan	12	12	847,231,234.00	833,978,861.00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	220	220	141,225,000.00	140,989,000.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	Orang	220	220	141,225,000.00	140,989,000.00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	97	97.42	15,946,621,514.00	13,754,816,045.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jiwa	659156	642153	15,946,621,514.00	13,754,816,045.00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melakukan Verifikasi dan Validasi	Desa/Kel	353	350	192,450,550.00	171,493,450.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data PKH yang Dilaksanakan	Kali	3	3		
		Persentase KPM Bantuan Sosial Lainnya yang Memenuhi Persyaratan	%	80	80	44,537,600.00	44,493,556.00
		Persentase KPM BPNT yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM BPNT	%	80	80		
		Persentase KPM PKH yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM PKH	%	80	80		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Pangan	KPM	2700	2700	15,291,332,494.00	13,217,755,314.00
		Jumlah Penerima Bantuan Program Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin	KPM	730	730		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE yang Dimonev	Kube	18	0	418,300,870.00	321,073,725.00

		Jumlah KUBE yang Memperoleh Akses Permodalan	Kube	18	15		
		Jumlah KUBE yang Terbentuk	Orang	180	180		
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Warga Miskin yang Dilatih					
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%	100	100	750,475,590.00	731,966,750.00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	%	100	100	400,000,000.00	392,642,700.00
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan permakanan	Orang	1000	928	400,000,000.00	392,642,700.00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang Dibina	Orang	50	50	350,475,590.00	339,324,050.00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang menerima penguatan SDM	Orang	50	50	350,475,590.00	339,324,050.00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	%	100	100	222,659,566.00	221,068,092.00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi yang Baik	%	100	100	222,659,566.00	221,068,092.00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	TMP	1	1	151,305,966.00	149,732,000.00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Keamanan Taman Makam Pahlawan yang terbayar	Orang	2	2	71,353,600.00	71,336,092.00
Jumlah						34,710,768,477.00	31,704,180,207.00

Sumber data : LRA Dinas Sosial Tahun 2022

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan;
2. Meningkatkan Pembinaan kepada mitra kerja Dinas Sosial seperti TKSK, PSM, LKS, LK3 Tagana, SLRT dan karang taruna secara berkala, karena mitra kerja ini sangat berkaitan erat dengan peningkatan penanganan dan pelayanan serta pengentasan kemiskinan
3. Melakukan pendataan PPKS dan data kemiskinan secara berkala;
4. Meningkatkan SDM mitra sosial agar optimalisasi pendataan DTKS dan PPKS secara terpadu;
5. Membentuk Puskesmas di setiap desa agar data selalu update;
6. Penggunaan aplikasi SIPEKA untuk meminimalisis kesalahan data;

7. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan untuk bekal peningkatan ekonomi keluarga penerima manfaat;
8. Pembentukan KUBE baru untuk membantu perekonomian PPKS.

3.3 Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi kinerja dan keuangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
				Target	Realisasi	%	TARGET	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	90	90	100%	7,642,410,705.00	6,979,940,339.00	91.33%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	4	100%	11,460,000.00	5,840,100.00	50.96%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan	Tahap	2	2	100%			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4	100%	2,000,000.00	1,219,900.00	61.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100%	3,210,000.00	747,000.00	23.27%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	100%	3,400,000.00	2,801,200.00	82.39%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%	2,850,000.00	1,072,000.00	37.61%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	90	91.34	101.49%	5,120,744,077.00	4,712,713,428.00	92.03%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100%	5,118,394,077.00	4,712,008,228.00	92.06%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	Laporan	1	1	100%	2,350,000.00	705,200.00	30.01%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	90	97.36	108.18%	602,692,268.00	521,929,451.00	86.60%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	Buah	119	119	100%	6,750,596.00	6,725,950.00	99.63%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Buah	894	878	98.21%	46,650,057.00	45,030,150.00	96.53%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah BBM yang disediakan	Liter	21300	17732	83.25%	213,000,000.00	177,344,819.00	83.26%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Lembar	3380	3350	99.11%	4,399,250.00	4,365,500.00	99.23%	
	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-	Jenis	3	3	100%	5,961,600.00	4,915,000.00	82.44%	

		undangan dan koran yang tersedia								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	Kotak	685	342	49.93%	14,862,500.00	6,823,100.00	45.91%	
		Jumlah kunjungan tamu yang diasilitasi	Orang	685	342	49.93%				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%	311,068,265.00	276,724,932.00	88.96%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan	Unit	13	13	100%	68,583,575.00	65,768,800.00	95.90%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang diadakan	Unit	13	13	100%	68,583,575.00	65,768,800.00	95.90%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	%	100	100	100%	1,199,770,800.00	1,089,998,853.00	90.85%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Surat	13000	12775	98.27%	500,000.00	500,000.00	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	12	100%	302,000,000.00	254,316,505.00	84.21%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Orang	228	228	100%	897,270,800.00	835,182,348.00	93.08%	
		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang	48	48	100%				
		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang	48	48	100%				
		Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang	336	336	100%				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	95	123	129.47%	639,159,985.00	583,689,707.00	91.32%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	40	34	85.00%	132,500,000.00	131,824,900.00	99.49%	
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	STNK	18	17	94.44%				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	2	2	100%	230,000,000.00	226,142,717.00	98.32%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	50	84	168%	196,029,985.00	166,618,750.00	85.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	3	3	100%	80,630,000.00	59,103,340.00	73.30%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	60	60	100%	2,534,086,740.00	2,496,348,625.00	98.51%	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina	PSKS	6	12	200%	2,534,086,740.00	2,496,348,625.00	98.51%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina	PSM	100	100	100%	72,000,000.00	66,000,000.00	91.67%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	TKSK	18	18	100%	432,000,000.00	432,000,000.00	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang dibina	PSKS Kelembagaan	5	5	100%	2,022,786,050.00	1,991,048,925.00	98.43%
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang dibina	LK3	1	1	100%	7,300,690.00	7,299,700.00	99.99%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS prioritas yang terlayani	%	59.51	59.51	100%	7,614,514,362.00	7,520,040,356.00	98.76%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani	Orang	1311	1311	100%	7,473,289,362.00	7,379,051,356.00	98.74%
		Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani	Orang	10	10	100%			
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani	Orang	120	120	100%			
		Jumlah PPKS Klien Liponsos yang Terlayani	Orang	900	900	100%			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan	Orang	2311	2311	100%	5,817,347,244.00	5,792,981,519.00	99.58%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan sandang	Orang	900	900	100%	45,101,800.00	34,308,000.00	76.07%
	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu	Orang	30	30	100%	144,650,000.00	133,526,800.00	92.31%
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	920	920	100%	386,650,000.00	382,332,600.00	98.88%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar mendapat bimbingan sosial	Keluarga	100	100	100%	17,275,000.00	16,975,000.00	98.26%
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan PMKS	Bulan	12	12	100%	215,034,084.00	184,948,576.00	86.01%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Bulan	12	12	100%	847,231,234.00	833,978,861.00	98.44%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	220	220	100%	141,225,000.00	140,989,000.00	99.83%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	Orang	220	220	100.00%	141,225,000.00	140,989,000.00	99.83%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	97	97.42	100.43%	15,946,621,514.00	13,754,816,045.00	86.26%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jiwa	659156	642153	97.42%	15,946,621,514.00	13,754,816,045.00	86.26%
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melakukan Verifikasi dan Validasi	Desa/Kel	353	350	99.15%	192,450,550.00	171,493,450.00	89.11%
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data PKH yang Dilaksanakan	Kali	3	3	100%			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KPM Bantuan Sosial Lainnya yang Memenuhi Persyaratan	%	80	80	100%	44,537,600.00	44,493,556.00	99.90%
		Persentase KPM BPNT yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM BPNT	%	80	80	100%			
		Persentase KPM PKH yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM PKH	%	80	80	100%			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Pangan	KPM	2700	2700	100%	15,291,332,494.00	13,217,755,314.00	86.44%
		Jumlah Penerima Bantuan Program Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin	KPM	730	730	100%			
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE yang Dimonev	Kube	18	0	0.00%	418,300,870.00	321,073,725.00	76.76%
		Jumlah KUBE yang Diperoleh	Kube	18	15	83%			

Analisis efisiensi

Berdasarkan tabel diatas bahwa indikator diatas telah menunjukkan efisiensi. Pencapaian efisiensi anggaran sebesar 9,34% dan 11,63% pada tahun 2022 didukung oleh upaya :

1. Ketaatan dalam tatalaksana organisasi dan penatausahaan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Kolaborasi antara Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Inspektorat, BPKAD dan UKPBJ Kabupaten Sidoarjo, jika terdapat ketidak sesuaian (hal baru yang belum diatur) untuk mendapatkan solusi.
3. Pelayanan JKMM secara online dengan menggunakan aplikasi SIPRAJA dan Si Whapik memudahkan pemohon dalam kepengurusan tanpa harus datang ke Dinas Sosial dan dapat mencetak sendiri.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Peningkatan Kesejahteraan Sosial dengan indikator berupa Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan tercapai sebesar 100,68%.
2. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS tercapai sebesar 102,97% dengan kategori sangat baik dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 91,34%.
3. Secara umum Dinas Sosial telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Penerapan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.
5. Keberhasilan ketercapaian ini tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik diinternal Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sendiri, serta terjalinnya hubungan baik dengan stakeholder/mitra sosial yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.
6. Kolaborasi penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dan program prioritas Bupati yaitu makanan gratis warga miskin dan beasiswa untuk mendukung ketercapaian kinerja Dinas Sosial;
7. Kemampuan SDM yang dimiliki juga menjadi faktor pendukung keberhasilan baik petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mitra sosial ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan tersebut. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 45 Sidoarjo

Telepon. 031-8921483

Email: dinsos.sidoarjo@gmail.com Website: www.sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS SOSIAL TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk, I (IV/b)

NIP. 196804111989081001

FORMULIR CHECK LIST REVIEW

NO.		PERNYATAAN	CHECK LIST		DATA PENDUKUNG
			YA	TIDAK	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	v		
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	v		
		3. Lkj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	v		
		4. Lkj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	v		
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan (M)	v		
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v		
II	Mekanisme penyusunan	1. Lkj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	v		
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang yang memadai	v		
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit ke unit penyusun LKj	v		
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	v		
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya (M)	v		
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	v		
		7. LKj IP <u>bulanan</u> merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya (M)			
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	v		
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v		
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v		
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja	v		
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja Utama	v		
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v		

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1w7WPG-x5_sgCNlq-xK_z5EiCLEm15vAK?usp=sharing

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/14ghKRFbNc4pVo9-RbXsyJjqQcEofi2d?usp=sharing>

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/1F8NhGywFbAYpKw10UFuikqkJaulo1u6?usp=sharing>

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/1Pjrg1fkY3W2FgRJ1DmWC2CyfNlfbuiFZ?usp=sharing>

E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/1wvbSKoQ94AC9cU8EKNX7US-wVnKoZzvR?usp=sharing>

